

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor keuangan memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya di negara sedang berkembang. Sistem keuangan suatu negara akan tertindas (tidak ada kebebasan) apabila pasar uangnya masih terbelakang dan harga-harga kekayaan finansialnya mengalami distorsi, yang pada umumnya ditandai dengan penetapan pagu suku bunga oleh pemerintah di bawah tingkat keseimbangan yang berlaku di pasar. Dalam kondisi sistem keuangan seperti tersebut, muncul dua karakteristik ke permukaan. Pertama, suku bunga deposito riil seringkali negative dan sukar diprediksi bila inflasi tinggi dan tidak stabil. Sedangkan yang kedua adalah kurs valuta asing penuh dengan ketidakpastian, akibatnya tabungan terhambat meskipun peluang untuk investasi cukup baik, pendangkalan keuangan dan pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Seperti negara berkembang pada umumnya, Indonesia mengalami kekurangan dana domestik guna membiayai pembangunan. Upaya mendatangkan modal asing untuk menutup kekurangan tabungan domestik sangat diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai.

Salah satu jenis modal asing yang masuk ke Indonesia adalah berupa pinjaman luar negeri baik yang mengalir ke sektor pemerintah maupun swasta nasional. Penggunaan pinjaman luar negeri mempunyai fungsi sebagai pelengkap dimana dana domestik masih belum memadai untuk membiayai seluruh proses pembangunan di Indonesia. Namun demikian, penggunaan pinjaman luar negeri yang semakin besar porsinya dalam pembiayaan pembangunan, telah menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara/lembaga donor, menimbulkan beban hutang yang semakin berat, dan turut andil pada terjadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Sehingga masalah utama yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun ini adalah terganggunya keseimbangan eksternal dan tingginya tingkat suku bunga nominal. Masalah ketidakseimbangan eksternal berasal dari dua sumber, yaitu memburuknya nilai tukar perdagangan sebagai akibat penurunan harga migas dan krisis ekonomi serta adanya fluktuasi nilai tukar mata uang internasional yang tidak menguntungkan dan meningkatkan beban hutang.

Untuk memperkokoh pondasi bagi proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mengurangi ketergantungan dari arus modal asing dan pinjaman luar negeri, yang telah menjadi salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia. Maka usaha mobilisasi dana domestik merupakan masalah yang sangat penting, agar penggunaan modal asing serta pinjaman luar negeri dapat dikurangi. Salah satu

institusi yang mempunyai peran penting dalam menghimpun dana masyarakat adalah lembaga perbankan, ini karena perbankan merupakan pelaku utama dalam perekonomian bangsa untuk menggerakkan pembangunan.(Subagyo,1999).

Untuk mendukung terciptanya hal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa langkah deregulasi sistim perbankan, yakni pemerintah menghilangkan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali JUB. Pemerintah juga memberikan kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektor-sektor tertentu, tahap pertama dari reformasi sektor keuangan, sejak 1984 pemerintah telah menggunakan pengendalian kredit domestik tidak langsung melalui manajemen uang primer. Otoritas moneter menggunakan Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mengendalikan uang beredar, dengan menerbitkan dua jenis instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).(Y.Sri S,dkk,1999).

Salah satu tujuan deregulasi finansial adalah meningkatkan tabungan domestik. Para ahli moneter percaya bahwa tarif suku bunga riil akan merangsang tabungan yang pada gilirannya akan mendorong investasi. Secara umum kita lihat pergerakan suku bunga nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun memasuki tahun 1998 peningkatan suku bunga nominal sangat tinggi yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia, namun tingginya tingkat suku bunga pada tahun 1998 tersebut juga diimbangi dengan tingginya tingkat

inflasi yang mencapai 77,55 persen, akibatnya tingkat suku bunga riil menjadi negative.

Pada saat itu likuiditas perekonomian nasional semakin ketat terutama akibat dinaikkannya suku bunga SBI untuk semua jangka waktu. Pergerakan suku bunga SBI menjadi tolak ukur bagi tingkat suku bunga lainnya, sehingga kenaikan suku bunga SBI menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternative lain untuk menghimpun dana selain menaikkan suku bunga simpanan. Upaya menghimpun dana dengan penaikan suku bunga simpanan ini semakin mendesak karena bank kesulitan likuiditas akibat dari proporsi kredit bermasalah yang semakin besar. Dalam kondisi normal, kenaikan suku bunga simpanan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman, sehingga nantinya suku bunga pinjaman tetap lebih tinggi daripada suku bunga simpanan. (Y. Sri S, dkk, 1999).

Tingginya tingkat bunga relative dibandingkan tingkat bunga internasional, dewasa ini lebih banyak bersumber dari kelemahan struktural dibandingkan kemampuan kebijakan moneter dalam mempengaruhi tingkat suku bunga. Dalam perekonomian makin terbuka, kemampuan kebijakan moneter dalam mempengaruhi tingkat bunga makin lemah. Ekspansi moneter dengan peningkatan kredit untuk menurunkan tingkat bunga menyebabkan terjadinya aliran modal keluar seperti yang terjadi belakangan ini dan mendorong depresiasi nilai tukar lebih cepat, sebaliknya kebijakan moneter ketat cenderung akan meningkatkan arus modal masuk dan apresiasi nilai tukar. Dengan demikian

upaya untuk mempengaruhi tingkat bunga domestik makin independen dengan kebijakan moneter.

Perbedaan suku bunga antara bank pemerintah dan swasta merupakan cermin dari resiko kelembagaan. Masyarakat cenderung merasa aman untuk menempatkan dana tabungannya pada bank pemerintah dibanding bank swasta, sehingga tidak mengherankan jika bank pemerintah menawarkan tingkat suku bunga deposito yang lebih rendah dibandingkan bank swasta. Tingkat suku bunga yang rendah disatu pihak dapat mendorong investasi, namun dipihak lain tidak mendorong mobilisasi dana melalui perbankan, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara tabungan dan investasi. Karena investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga, maka seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana.(Nopirin,1992). Suku bunga yang rendah dapat pula mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri sehingga dapat memberikan tekanan pada neraca pembayaran dan semakin menurunkan mobilisasi dana dalam negeri. Demikian pula sebaliknya suku bunga yang tinggi tidak mendorong kegiatan investasi dan produksi.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Suku Bunga Deposito dan Produk Domestik Bruto terhadap Tabungan Masyarakat di Indonesia (1994.1 – 2004.4)”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu dalam bentuk kuartalan, dari tahun 1994.1 sampai tahun 2004.4. Dimana hanya dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat di Indonesia yaitu suku bunga deposito dan produk domestik bruto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun mengenai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh suku bunga deposito terhadap tabungan masyarakat di Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh produk domestik bruto terhadap tabungan masyarakat di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Agar sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga deposito terhadap tabungan masyarakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk domestik bruto terhadap tabungan masyarakat di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dapat menerapkan teori dan konsep yang diperoleh dari perguruan tinggi dan dapat belajar melakukan penelitian secara ilmiah.
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang moneter khususnya dan bidang ekonomi pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian pemerintah, institusi yang berminat dalam menangani persoalan tabungan.